

Development of the National Education Curriculum from the Old Order Era to the Reform and Decentralization Era (1947-2022)

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Nasional Era Orde Lama Hingga Era Reformasi dan Desentralisasi (1947-2022)

Fariq Syah Putra^{1a}, Ahmad Basyori^{2b}, Aan Budianto^{3c}

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jl. Letnan Kolonel H HI. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung

^a*fariqsyahputra06@gmail.com*

^b*ahmad.basyori@radenintan.ac.id*

^c*aanbudianto@radenintan.ac.id*

(*) Corresponding Author
fariqsyahputra06@gmail.com

How to Cite: Putra, et al. (2020). Development of the National Education Curriculum from the Old Order Era to the Reform and Decentralization Era (1947-2022). doi: 10.36526/js.v3i2.6489

Abstract

Received : 01-11-2025

Revised : 23-02-2026

Accepted : 05-05-2026

Keywords:

Curriculum,
National,
Old Order,
Reform,
Decentralization,
History Of Education

This research, entitled "The Development of the National Education Curriculum from the Old Order Era to the Reform and Decentralization Era (1947–2022)," is motivated by the importance of the curriculum as a strategic instrument in determining the direction, content, and quality of national education. The curriculum serves not only as a technical guide for learning but also as an ideological, social, and political tool for shaping the nation's character in accordance with the dynamics of the times. The purpose of this research is to analyze the development and changes in the Indonesian national education curriculum from the Old Order era, the New Order era, to the Reform and Decentralization era. The research method used is historical, with four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results show that during the Old Order era (1947–1965), the curriculum was oriented towards the formation of national character and the strengthening of national identity through the 1947 Lesson Plan, the 1952 Detailed Lesson Plan, and the 1964 Curriculum, which emphasized the Pancasila concept. During the New Order era (1968–1998), the curriculum became a tool for centralistic state ideological control, as reflected in the 1968, 1975, 1984, and 1994 Curricula which focused on political stability and Pancasila values. Entering the Reformation and Decentralization era (2004–2022), the direction of education policy shifted toward a decentralized and competency-based paradigm. The Competency-Based Curriculum (2004), the KTSP (School-Based Curriculum) (2006), the 2013 Curriculum, the Emergency Curriculum (2020–2021), and the Independent Curriculum (2022).

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peran yang sangat penting untuk memperkuat identitas nasional, serta membangun peradaban bangsa. Dengan kurikulum negara menanamkan nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi dasar bagi pembentukan karakter serta kompetensi warga negara. Dengan demikian, kurikulum bukan hanya pedoman teknis pembelajaran, tetapi juga cerminan dari visi pendidikan nasional dan arah pembangunan bangsa. Sebagaimana dikemukakan oleh (Soedijarto, 2008), kurikulum yang baik akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Perubahan kurikulum tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, politik, dan budaya suatu bangsa. Dalam sejarah Indonesia, dinamika kurikulum mencerminkan perubahan orientasi ideologi dan kebijakan negara. Setiap pergantian rezim politik membawa paradigma baru terhadap

pendidikan. Kurikulum menjadi cermin ideologis dan strategis dalam membentuk manusia Indonesia sesuai dengan kebutuhan zamannya (Tilaar, 2004). Oleh karena itu, memahami perkembangan kurikulum berarti menelusuri bagaimana pendidikan nasional beradaptasi terhadap perubahan nilai, kekuasaan, dan tuntutan global yang terus berkembang. Sejak masa awal kemerdekaan, pemerintah telah menyadari pentingnya pendidikan sebagai sarana pembentukan identitas dan stabilitas nasional.

Kurikulum 1947 dan 1950 menitikberatkan pada pembentukan warga negara yang demokratis dan berkepribadian Indonesia. Selanjutnya, Kurikulum 1964 memperkenalkan mengintegrasikan lima dimensi fundamental manusia ke dalam kurikulum pendidikan: moral, intelektual, keterampilan, seni, dan jasmani. Namun, peralihan kekuasaan membawa perubahan besar terhadap orientasi pendidikan nasional. Kurikulum 1968 yang lahir pada masa awal pemerintahan Soeharto menandai dimulainya era baru pendidikan Indonesia yang berorientasi pada stabilitas politik dan pembangunan nasional. Kurikulum ini secara ideologis diarahkan untuk membentuk manusia Pancasila yang patuh, disiplin, serta loyal terhadap negara dan pemerintah. Sejak saat itu, fungsi pendidikan tidak hanya untuk instrumen pengajaran, tetapi juga sebagai alat kontrol ideologi dan legitimasi politik.

Dalam konteks inilah, kurikulum berperan sebagai perangkat strategis negara untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan mendukung agenda pembangunan Orde Baru (Alhamduddin, 2016). Periode 1970–1990-an memperlihatkan upaya kuat pemerintah untuk menyelaraskan kurikulum dengan strategi pembangunan nasional. Kurikulum 1975, dengan pendekatan *Management by Objectives (MBO)*, menekankan efisiensi dan rasionalisasi dalam pembelajaran. Kurikulum 1984 memperkenalkan *Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA)* sebagai bentuk pembaharuan pedagogis yang lebih progresif, namun penerapannya masih terbatas oleh sarana dan kompetensi guru. Kurikulum 1994 kemudian mencoba mengintegrasikan pendekatan akademis dan nilai nasionalisme, namun justru menimbulkan beban berlebih karena padatnnya materi dan minimnya fleksibilitas. Ketiga kurikulum ini menunjukkan bahwa pendidikan pada masa Orde Baru berfungsi sebagai instrumen pembangunan dan kontrol sosial yang sangat sentralistik.

Memasuki era Reformasi, arah kebijakan pendidikan nasional berubah secara mendasar. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 menandai pergeseran paradigma pendidikan dari *input-based* menuju *outcome-based*, di mana keberhasilan pembelajaran diukur dari kemampuan peserta didik menguasai kompetensi tertentu. Pelaksanaan KTSP menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan kapasitas sekolah dan guru antarwilayah. Kurikulum 2013 lahir sebagai respon terhadap kebutuhan pembelajaran abad ke-21, dengan menekankan pendekatan ilmiah (*scientific approach*), integrasi nilai karakter, dan penguatan literasi. Kurikulum ini mengembalikan fungsi pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang beriman, produktif, dan kreatif. Namun, implementasinya di lapangan belum optimal karena terbatasnya pelatihan guru dan kesenjangan sarana pembelajaran (Kristiawan, 2017). Kehadiran Kurikulum Merdeka pada tahun 2022 menjadi tonggak penting dalam perjalanan kurikulum nasional. Kurikulum ini menegaskan paradigma baru pendidikan yang berlandaskan pada filosofi Ki Hadjar Dewantara, Pendidikan sejatinya berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan potensi bawaan peserta didik agar dapat beraktualisasi secara otonom.

Dari perjalanan panjang ini dapat disimpulkan bahwa kurikulum Indonesia telah mengalami perkembangan sentralistik dan ideologis menuju paradigma demokratis, desentralistik, dan berbasis kompetensi. Setiap perubahan kurikulum tidak hanya merefleksikan kemajuan pendidikan, tetapi juga menjadi indikator perubahan sosial dan politik bangsa. Dengan memahami dinamika ini, penelitian mengenai *Perkembangan Kurikulum Pendidikan Nasional Era Orde Lama hingga Era Reformasi dan Desentralisasi (1947–2022)* menjadi penting untuk menelaah bagaimana pendidikan Indonesia berevolusi dari alat politik menuju sarana pemberdayaan manusia. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara kebijakan pendidikan, filosofi nasional, dan dinamika sosial politik yang membentuk arah pembangunan bangsa.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode sejarah sebagai kerangka analisisnya. Pendekatan ini sebagai proses dalam menguji dan menganalisa kebenaran, dokumen-dokumen secara otentik dan dapat dipercaya. Peneliti menggunakan metode historis untuk menganalisis data secara kritis, baik dari rekaman maupun peninggalan masa lampau, dan menyajikan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh. Langkah-langkah penelitian historis secara metodologis, kajian ini menempuh empat fase utama penelitian sejarah, yang meliputi pengumpulan sumber (heuristik), validasi data (kritik), penafsiran makna (interpretasi), serta penulisan kisah sejarah secara ilmiah (historiografi) (Daliman, 2012). Dengan demikian, peneliti dapat menyajikan hasil penelitian yang akurat dan berdasarkan fakta sejarah yang telah terverifikasi.

1. *Heuristik* merupakan tahap awal dalam proses penelitian sejarah untuk mendapatkan sumber yang akurat dan relevan. (Suhartono, 2010). Pada tahap *heuristik* peneliti mengumpulkan data-data sumber sejarah terkait dengan Sejarah kurikulum berupa arsip-arsip, buku, dokumen, koran, jurnal yang relevan dengan judul penelitian. seperti sumber yang didapat dari website ANRI dengan judul "Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 008c/U/1975 tentang Pembakuan Kurikulum Sekolah Dasar. 17 Januari 1975".
2. Menurut Suhartono, Kritik sumber sejarah adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas sumber sejarah (Suhartono, 2010). Dalam penelitian sejarah, kritik sumber dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal bertujuan menilai keaslian suatu sumber, biasanya dengan menelusuri unsur 5W+1H. Sementara itu, kritik internal menekankan pada kredibilitas isi dokumen sebagai fakta sejarah. Pada penelitian ini, kritik sumber diterapkan untuk memilah dan memastikan data yang valid (Sumargono, 2021) sesuai dengan fokus kajian Transformasi Kurikulum Pendidikan di Lampung dalam Perspektif Sejarah 1970an–2022.
3. Interpretasi dalam penelitian sejarah adalah proses penafsiran dan analisis terhadap berbagai fakta sejarah yang telah divalidasi melalui tahapan kritik sumber. Pada tahap ini, peneliti mencoba untuk memahami dan menjelaskan fakta-fakta yang telah dikumpulkan, serta menjabarkan hasil penelitian secara lebih mendalam. Interpretasi memungkinkan peneliti untuk memberikan makna dan signifikansi pada fakta-fakta sejarah, serta untuk membangun narasi yang koheren dan logis tentang peristiwa atau fenomena sejarah yang diteliti terkait Transformasi Kurikulum Pendidikan di Lampung dalam Perspektif Sejarah 1970an–2022.
4. Tahapan terakhir atau Historiografi mencakup penulisan sejarah berdasarkan temuan yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Historiografi memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan untuk pembaca, serta untuk meninggalkan catatan sejarah yang akurat (Daliman, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil



Gambar 1. Kurikulum Sekolah Dasar 1975: Garis-Garis Besar Program Pengajaran Buku I (Sumber : Depdikbud, 1976)

Dokumen resmi “Kurikulum Sekolah Dasar 1975: Garis-Garis Besar Program Pengajaran Buku I, Ketentuan-Ketentuan Pokok” pengatur pembelajaran secara terperinci, objektif, dan terukur. Guru tidak lagi bebas menentukan isi pembelajaran secara otonom, melainkan harus mengikuti panduan nasional yang telah ditetapkan oleh Depdikbud.

Penerapan GBPP ini mencerminkan semangat teknokratisasi pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan diatur sedemikian rupa agar seluruh satuan pendidikan bergerak dalam arah dan tujuan yang sama efisiensi, produktivitas, dan keseragaman nasional. Namun, di sisi lain, pola ini juga menimbulkan beban administratif yang berat bagi guru, karena mereka harus menyesuaikan seluruh perangkat pembelajaran secara detail sesuai standar yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. GBPP dalam Kurikulum 1975 dapat dipandang sebagai tonggak penting dalam sejarah perencanaan pendidikan nasional Indonesia. Dokumen ini menjadi dasar berkembangnya sistem penyusunan silabus dan RPP modern, sekaligus memperlihatkan karakter utama pendidikan Orde Baru yang menekankan efisiensi, kontrol, dan keseragaman dalam pelaksanaan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 2. Sampul Dokumen Kurikulum 1984 (Sumber : Depdikbud, 1984)

Dokumen ini menjadi acuan utama pelaksanaan kurikulum di berbagai jenjang pendidikan pada masa Orde Baru. Dokumen ini menjadi acuan utama pelaksanaan kurikulum di berbagai jenjang pendidikan pada masa Orde Baru. Kurikulum 1984 memiliki sejumlah ciri utama yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya, yaitu:

1. Menekankan pada aktivitas belajar siswa (CBSA).
2. Menitikberatkan pada pendekatan proses, bukan hasil semata..

3. Menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme dan moral Pancasila. Hal ini diwujudkan melalui integrasi mata pelajaran PSPB dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP).
4. Adanya penyesuaian materi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pemerintah mulai memperkenalkan pelajaran sains dan teknologi secara lebih terstruktur, sejalan dengan arah pembangunan nasional



Gambar 3. Keputusan Mendikbudristek Nomor 262/M/2022 (*Sumber : Mendikbudristek*)

Gambar berikut menampilkan cuplikan dokumen keputusan menteri tersebut sebagai dasar hukum implementasi kurikulum di satuan pendidikan. Kebijakan ini merupakan bagian dari program besar Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Nadiem Anwar Makarim. Tujuannya bukan sekadar memberi pilihan kurikulum, melainkan melakukan transformasi mendasar. Pada tahap awal, sekolah diberi opsi tetap menerapkan K 13. Kurikulum Darurat, atau beralih ke Kurikulum Merdeka. Namun, arah jangka panjang pemerintah adalah menjadikan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional utama yang menggantikan K-13. Kurikulum Merdeka membawa sejumlah perubahan besar dibanding kurikulum sebelumnya, baik dari sisi struktur, pendekatan, maupun penilaian. Sistem penerapannya dirancang agar lebih adaptif, kontekstual, dan berfokus pada esensi pembelajaran (Kepmendikbudristekdikti, 2022).

Pembahasan

Kedaaan Kurikulum Pada Masa Orde Lama Kurikulum 1947

Kurikulum 1947 lahir dalam konteks sejarah yang sangat penting, yaitu masa awal kemerdekaan ketika Indonesia baru saja lepas dari belenggu kolonialisme. Kurikulum ini merupakan tonggak pertama dalam upaya membangun sistem pendidikan nasional yang bebas dari pengaruh penjajahan. Meskipun secara struktur dan metode pembelajarannya masih banyak mengadaptasi sistem pendidikan Belanda karena keterbatasan sumber daya dan tenaga pendidik kala itu substansi dan orientasinya telah mengalami perubahan mendasar (Alhamduddin, 2016). Kurikulum 1947 memiliki tujuan membentuk manusia Indonesia yang merdeka secara lahir serta batin, memiliki kesadaran kebangsaan, moralitas, dan rasa tanggung jawab sosial. Pendidikan dipandang bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan sarana pembentukan watak dan kepribadian nasional. Cinta tanah air, serta semangat perjuangan menjadi inti dari setiap proses pembelajaran (Wirianto, 2014).

Filosofi yang mendasari kurikulum ini erat kaitannya dengan gagasan Ki Hadjar Dewantara, Konsep ini memposisikan pendidikan sebagai upaya sistematis dalam mengarahkan seluruh potensi bawaan peserta didik secara harmonis dengan alam, masyarakat, dan bangsanya. Secara operasional, kurikulum ini masih sederhana belum memiliki pembagian mata pelajaran yang rinci ataupun sistem evaluasi yang baku. Namun, kesederhanaan itu justru mencerminkan semangat perjuangan zaman, di mana pendidikan difokuskan pada penanaman nilai-nilai dasar kebangsaan dan pembentukan manusia yang berkarakter. Guru berperan sebagai pendidik moral dan pejuang budaya, bukan sekadar pengajar akademik (Fitri Wahyuni, 2015).

Kurikulum 1952

Kurikulum ini, yang dikenal juga Rencana Pelajaran Terurai, merupakan hasil penyempurnaan dari Kurikulum 1947. Sekaligus bentuk konkret upaya pemerintah memperjelas arah pendidikan nasional. Kurikulum ini disusun pada masa Menteri Pendidikan Wongsonegoro, di tengah suasana politik yang relatif stabil setelah masa revolusi fisik. Fokus utama kurikulum ini melakukan pembinaan warga negara Indonesia yang demokratis dan tanggung jawab, serta sadar akan perannya dalam masyarakat. Ciri khas utama kurikulum ini adalah penyusunan materi pelajaran yang lebih sistematis dan terperinci (terurai). Jika kurikulum sebelumnya masih bersifat umum dan idealistik, maka Kurikulum 1952 sudah mulai menampilkan kerangka pembelajaran yang lebih terstruktur dan operasional (Farah, 2019). Guru diharapkan mampu menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, sehingga pendidikan menjadi relevan dengan tantangan sosial dan ekonomi bangsa pasca-kemerdekaan.

Secara filosofis, Kurikulum 1952 masih sangat dipengaruhi oleh pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pendidikan dipahami sebagai instrumen pendamping yang mengarahkan alur perkembangan individu selama masa pertumbuhannya *secara kodrati*. Pendidikan bukan proses memaksakan kehendak dari luar, tetapi penuntunan agar potensi anak berkembang selaras dengan alam, masyarakat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Gagasan ini melahirkan paradigma pendidikan yang berpusat pada anak (*student-centered*), yang kelak menjadi dasar pendekatan pedagogis modern di Indonesia. Kebijakan, Kurikulum 1952 juga mencerminkan semangat demokratisasi pendidikan (Wirianto, 2014).

Perkembangan Kurikulum 1968-1998 (Era Orde Baru)

Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 menjadi kurikulum pertama yang diterapkan pada era pemerintahan Orde Baru setelah Presiden Soekarno lengser. Kurikulum ini mulai berlaku secara nasional pada 1968 di bawah pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pelaksanaan kurikulum ini secara yuridis, landasan pendidikan nasional diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 yang mengatur tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan. Regulasi ini disahkan pada 5 Juli 1966 di bawah otoritas Jenderal TNI A.H. Nasution di Jakarta. Kurikulum 1968 ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Ida Anwar, yang menekankan bahwa pendidikan harus diarahkan sebagai pembentuk warga negara berjiwa Pancasila, serta memiliki semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara. Fokus pembelajaran diarahkan pada penanaman moral dan kedisiplinan, sejalan dengan agenda politik Orde Baru yang berorientasi pada stabilitas nasional (Rahmat et al., 2008).

Ditinjau dari filosofi, kurikulum ini berpijak pada filsafat idealisme negara, yaitu membentuk warga negara yang patuh, religius, dan setia kepada pemerintah. Kurikulum ini menggantikan konsep *Pancawardhana* dari Kurikulum 1964 yang dianggap terlalu luas dan kurang menekankan ideologi negara. Tujuan ini sesuai dengan Pasal 3 TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang menekankan pembentukan manusia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan berlakunya Kurikulum 1968, pemerintah Orde Baru berupaya menciptakan sistem pendidikan yang

disusun lebih sistematis dan terarah guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Rahmat et al., 2008).

Kurikulum 1975

Seiring dengan meningkatnya stabilitas politik dan dimulainya era pembangunan jangka panjang (*Pelita*), pemerintah mulai mengarahkan pendidikan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Kurikulum 1975 disusun di bawah otoritas Prof. Dr. Sjarif Thayeb selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu dengan filosofi dasar bahwa pendidikan harus efisien, terencana, dan dapat menciptakan sumber daya yang berkualitas dan produktif. Penerapan kurikulum ini dilandasi semangat pembangunan nasional Orde Baru yang berorientasi pada efisiensi, produktivitas, dan pembentukan manusia pembangunan. Tujuan utama Kurikulum 1975 bertujuan untuk mewujudkan profil manusia Indonesia yang memiliki integritas spiritual melalui iman dan takwa, memiliki keluhuran moral, serta mencapai keseimbangan kesejahteraan baik secara fisik maupun psikologis, dan memiliki keterampilan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

Filosofi yang mendasari kurikulum ini adalah filsafat pragmatisme dan behaviorisme. Pendidikan dipandang sebagai proses pembentukan perilaku yang dapat diukur secara objektif melalui indikator yang jelas. Kurikulum 1975 juga memperkenalkan struktur perencanaan pembelajaran yang terstandar secara nasional melalui dokumen resmi yang dikenal dengan nama GBPP. Dokumen ini diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) pada tahun 1976 sebagai lampiran pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 008d/U/1975 (Indonesia, 1976). GBPP menjadi pedoman teknis utama yang menjabarkan arah, ruang lingkup, dan sasaran pembelajaran. Sebagai contoh, dalam dokumen resmi pengatur pembelajaran secara terperinci, objektif, dan terukur. Guru tidak lagi bebas menentukan isi pembelajaran secara otonom, melainkan harus mengikuti panduan nasional yang telah ditetapkan oleh Depdikbud.



Gambar 4. Kurikulum Sekolah Dasar 1975: Garis-Garis Besar Program Pengajaran Buku I
(Sumber: Depdikbud, 1976)

Dokumen ini menjadi dasar berkembangnya sistem penyusunan silabus dan RPP modern, sekaligus memperlihatkan karakter utama pendidikan Orde Baru yang menekankan efisiensi, kontrol, dan keseragaman dalam pelaksanaan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Alhamduddin, 2016).

Kurikulum 1984

Perubahan dari Kurikulum 1975 menuju Kurikulum 1984 didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dinilai terlalu menekankan hasil belajar (*output oriented*) dan kurang memperhatikan aktivitas serta kreativitas siswa. Pemerintah menyadari bahwa model pembelajaran yang bersifat instruksional dan mekanis tidak mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan partisipatif pada diri siswa. Perubahan dari Kurikulum 1975 ke Kurikulum 1984 didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang terlalu berfokus pada hasil akhir dan mengabaikan proses belajar siswa. Kurikulum 1975 dinilai terlalu mekanis, kaku, dan berpusat pada guru, sehingga proses pembelajaran kehilangan unsur kreativitas dan keaktifan

siswa. Kurikulum ini memperkenalkan pendekatan CBSA merupakan sebuah paradigma pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam memperoleh pengetahuan (H. Tilaar, 1955). Kurikulum 1984 diluncurkan melalui inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto. Reformasi ini lahir sebagai respon terhadap kelemahan kurikulum sebelumnya yang terlalu menekankan hafalan dan hasil tes. Pemerintah ingin mengembalikan fungsi sekolah sebagai tempat tumbuhnya kemampuan berpikir kritis dan aktivitas belajar yang bermakna bagi siswa.

Filosofi pendidikan yang diusung adalah konstruktivisme dan humanisme moderat. Konsep utama kurikulum ini adalah Belajar Aktif di mana siswa diharapkan lebih banyak berpikir, berdiskusi, dan menemukan pengetahuan melalui pengalaman langsung Kurikulum 1984 menekankan dua hal pokok: 1) Inovasi pedagogis melalui penerapan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), 2) Penanaman nilai-nilai nasionalisme dan ideologi Pancasila (Kristiawan, 2017). Kurikulum 1984 disusun untuk memperkuat orientasi proses belajar dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui PSPB. Gambar berikut memperlihatkan dokumen resmi pedoman pelaksanaan kurikulum yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1984.



Gambar 5. Sampul Dokumen Kurikulum 1984 (Sumber: Depdikbud, 1984)

Dokumen ini menjadi acuan utama pelaksanaan kurikulum di berbagai jenjang pendidikan pada masa Orde Baru. Kurikulum 1984 memiliki sejumlah ciri utama yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1984 berhasil menyeimbangkan antara modernisasi pendidikan dan penguatan ideologi negara. Dengan memperkenalkan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), kurikulum ini membuka ruang bagi siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, sementara itu juga memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila, semangat perjuangan bangsa, dan loyalitas terhadap negara tetap menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan nasional (Kebudayaan, 1985).

Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 merupakan evolusi dari kurikulum sebelumnya yang mengacu pada UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989. Fokus utamanya adalah optimalisasi kualitas instruksional agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia pendidikan dan dinamika sosial. diberlakukan secara resmi pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Wardiman Djodjonegoro. Kurikulum ini lahir pada saat pemerintah Orde Baru memasuki fase akhir kekuasaannya, di mana modernisasi dan pembangunan ekonomi mulai diimbangi dengan kebutuhan penguatan nilai moral dan karakter bangsa. Kurikulum ini memiliki beberapa ciri utama, seperti pembagian tahapan pelajaran dengan sistem caturwulan, penekanan pada materi pelajaran yang padat, pembelajaran aktif, pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, dan pengajaran progresif. Tujuan Kurikulum 1994 adalah mencetak manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan siap menghadapi tantangan pembangunan nasional yang berorientasi ekonomi dan teknologi (Alhamduddin, 2016).

Kelahiran Kurikulum 1994 tidak dapat dilepaskan dari konteks politik Orde Baru yang menekankan stabilitas nasional, efisiensi pembangunan, dan homogenitas ideologi. Pendidikan menjadi instrumen strategis untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan loyalitas terhadap pemerintah. Dalam situasi global awal 1990-an yang mulai diwarnai globalisasi dan

kemajuan teknologi informasi, pemerintah juga menyadari perlunya peningkatan daya saing sumber daya manusia. Kurikulum harus mampu mencetak lulusan ideologis saja tetapi juga produktif secara ekonomi. Dengan kata lain, Kurikulum 1994 menjadi sintesis antara ideologisasi dan modernisasi pendidikan (Farah, 2019).

Filosofi pendidikan yang mendasari Kurikulum 1994 adalah filsafat eklektik, yaitu gabungan antara idealisme, pragmatisme, dan nasionalisme. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan akademik sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air. Kurikulum 1994 menjadi titik balik penting dalam sejarah pendidikan nasional, dengan kelebihan dan kekurangannya. Meskipun berhasil menata sistem pendidikan secara terstruktur dan terstandar, namun gagal memberikan ruang kebebasan pedagogis yang memungkinkan inovasi di tingkat sekolah. Kritik terhadap kurikulum ini menjadi dasar kuat bagi pembaruan kurikulum di era Reformasi (Kristiawan, 2017)

Perkembangan Kurikulum 2004-2022 (Era Reformasi dan Desentralisasi) Kurikulum 2004, KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)

Kurikulum ini mulai disahkan dan diterapkan pada tahun 2004, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Kurikulum ini diproyeksikan sebagai solusi atas berbagai keberatan terhadap kurikulum 1994, yang dinilai memiliki beban materi terlalu masif dan padat bagi peserta didik (*content oriented*) dan kurang aplikatif. Kurikulum ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem pendidikan nasional. Berdasarkan Landasan yuridis pendidikan Indonesia berpijak pada Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

Lebih lanjut dijabarkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang menjadi pedoman fundamental dalam mewujudkan acuan utama dalam penyusunan KBK, dengan Pasal 35 menekankan bahwa standar kompetensi lulusan harus dimanfaatkan untuk pedoman pengembangan kurikulum, sistem pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Ini menunjukkan bahwa kurikulum harus berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik. Selain itu, PP No. 25 Tahun 2000 merupakan landasan operasional otonomi daerah yang mengatur pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Aturan ini memastikan bahwa setiap tingkatan pemerintahan memiliki kemandirian dalam menjalankan fungsi pelayanan publik sesuai dengan porsi kewenangan yang telah ditetapkan, serta menyalurkan proses pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik peserta didik di lapangan.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 merupakan tonggak awal reformasi pendidikan pasca tumbanganya Orde Baru. Kurikulum ini disusun di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Malik Fadjar. Filosofi pendidikan yang mendasari KBK adalah progresivisme dan konstruktivisme, yang menekankan pengembangan kemampuan siswa dalam mengonstruksi pengetahuan melalui pengalaman belajar (Agustinova, 2018).

Dalam KBK, tujuan pendidikan tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan melainkan kemampuan mengaitkannya dengan keiduppan nyata. Kurikulum berbasis kompetensi juga menekankan pada penggunaan sumber belajar yang tidak terbatas pada guru. Namun, sumber pembelajaran dapat berasal dari berbagai sumber lain yang edukatif, seperti buku, internet, dan pengalaman lapangan. Penilaian dalam kurikulum ini juga komprehensif, mencakup proses dan hasil belajar siswa (Farah, 2019). Kurikulum berbasis kompetensi bertujuan untuk membentuk siswa yang terampil dan siap bersaing. Siswa yang kompeten dalam berbagai situasi dan konteks. Dengan demikian, kurikulum berbasis kompetensi adalah pendekatan yang sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan di era modern ini (Wirianto, 2014).

Kurikulum 2006 KTSP (Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan)

Pemerintah secara resmi memperkenalkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo. Kebijakan ini merupakan evolusi dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang bertujuan memberikan otonomi penuh bagi satuan pendidikan dalam merancang silabus yang relevan

dengan kondisi daerah masing-masing. Prof. Dr. Bambang Sudibyo, sebagai penyempurnaan dari KBK. Kurikulum ini lahir di tengah semangat reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Filosofi pendidikan yang mendasarinya adalah desentralisasi, humanisme, dan konstruktivisme sosial. Kurikulum ini memberikan otonomi luas kepada sekolah dan guru dalam menyusun berdasarkan karakteristik dan keperluan peserta didik di daerahnya.

KTSP menegaskan desentralisasi pendidikan dengan memberikan wewenang lebih bagi masing-masing sekolah dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai kondisi lokal, potensi daerah, serta kebutuhan peserta didik. KBK awalnya diuji coba secara terbatas hingga awal 2006 sebelum dihentikan. Setelah terbit Permendiknas No. 24 Tahun 2006, diberlakukan kurikulum ini secara substansi mirip dengan kurikulum sebelumnya. Perbedaan utamanya ada pada kewenangan penyusunan kurikulum yang mengikuti prinsip desentralisasi. Melalui KTSP, sekolah dan guru diberi kebebasan menyesuaikan, merevisi, dan menambah kurikulum sesuai kebutuhan lokal (Wina Sanjaya, 2008) Dengan demikian, KTSP mendorong satuan pendidikan untuk menciptakan selaras pada potensi sekolah, kebutuhan siswa/i, dan kondisi sosial serta budaya masyarakat setempat. Fleksibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna bagi siswa (Arifin, 2011).

Tahun 2010-2022 (Modernisasi Pendidikan)

Kurikulum 2013

Lahirnya Kurikulum 2013 (K-13) didorong oleh beberapa faktor utama. Perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut adanya peserta didik agar mampu menghadapi tantangan global dengan kemampuan yang adaptif, inovatif, kreatif, komunikatif, dan mampu berkolaborasi. Selain itu, tantangan global semakin nyata dengan tingginya tantangan capaian belajar siswa Indonesia yang masih rendah dalam survei internasional seperti PISA dan TIMSS yang menilai kemampuan literasi, numerasi, dan sains. Kelemahan kurikulum KTSP pada implementasi, khususnya dalam hal struktur materi dan penanaman karakter, juga menjadi alasan penting untuk mengembangkan kurikulum baru yang lebih terarah (Mulyasa, 2013).

Kurikulum 2013 diluncurkan pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhammad Nuh, dengan tujuan utama membentuk peserta didik yang berkarakter, produktif, dan inovatif. Filosofi pendidikan yang diusung adalah integratif-humanistik. Kurikulum ini menerapkan pendekatan ilmiah (*scientific approach*) yang mencakup lima langkah: mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan (Abdullah Idris, 2013).

Kebijakan ini menjadi landasan bahwa K-13 hadir untuk memperkuat pendidikan karakter, mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Dengan kebijakan ini, sekolah diberi kewenangan lebih besar dalam mengelola proses pembelajaran. Namun, dalam praktiknya, KTSP masih memiliki keterbatasan (Wirianto, 2014). Kurikulum ini bertujuan membentuk SDM yang produktif, kreatif, inovatif, serta memiliki kepribadian dan akhlak mulia (Aslan, 2019) . Kurikulum 2013 disahkan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Pengesahan kurikulum ini dilakukan pada tahun 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Mohammad Nuh, guna menjawab kebutuhan akan relevansi pendidikan di era modern (Abdullah Idris, 2013).

Kurikulum 2020-2021 (Kurikulum Darurat)

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020, pemerintah mengesahkan Kurikulum Darurat yang bertujuan untuk menyederhanakan kompetensi dasar guna menjaga efektivitas pembelajaran di tengah situasi krisis. Regulasi ini berfungsi sebagai panduan teknis penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang berada dalam situasi luar biasa.

Kebijakan strategis tersebut diinisiasi oleh Kemdikbud di bawah arahan Nadiem Anwar Makarim guna memberikan fleksibilitas instruksional di tengah kondisi krisis dan secara resmi disahkan serta diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang memberikan fleksibilitas kepada sekolah agar tetap menjalankan proses belajar- mengajar melalui metode yang lebih sederhana dan kontekstual.

Kurikulum ini tetap berpedoman pada Kurikulum 2013, namun dengan penyederhanaan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar diselaraskan dengan kebutuhan siswa, potensi daerah, dan kondisi sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah tidak dibebani kewajiban menuntaskan semua capaian kurikulum sebagai prasyarat kenaikan kelas maupun kelulusan, sehingga beban siswa dan guru dapat diminimalkan (Munajim et al., 2020).

Sekolah dapat menggunakan perangkat ajar Kurikulum 2013, dengan cara memilih materi yang selaras dengan kompetensi yang dimiliki diprioritaskan dalam kurikulum darurat. Pemerintah juga menyediakan modul literasi dan numerasi untuk jenjang sekolah dasar sebagai pendukung pembelajaran Modul ini diharapkan dapat mendorong guru untuk mengembangkan perangkat ajar lainnya yang relevan dengan kondisi khusus, dengan tetap berorientasi pada penguatan literasi dan numerasi di semua mata pelajaran.

Dalam implementasi kurikulum darurat, penataan beban kerja guru dan pengaturan linieritas bagi guru bersertifikat pendidik masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimaksudkan agar pembelajaran tetap berjalan dengan efektif sekaligus menjaga profesionalitas tenaga pendidik dalam situasi darurat. Dengan demikian, kurikulum darurat dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi keteringgalan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan di tengah kondisi khusus (Nugroho & Narawaty, 2022).

Kurikulum 2022, Kurikulum Merdeka (KURMER)

Kurikulum Merdeka merupakan kerangka pembelajaran adaptif yang bertujuan memulihkan pendidikan nasional. Prioritas utamanya terletak pada penyajian materi yang fundamental serta pengoptimalan potensi kompetensi dan kepribadian peserta didik secara holistik. Kurikulum ini memiliki ciri utama yang mendukung proses pemulihan tersebut, antara lain penggunaan pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum ini dirancang untuk fokus pada materi esensial yang memungkinkan pembelajaran mendalam.

Kurikulum Merdeka menekankan penguatan kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi sebagai fondasi utama pembelajaran. Kurikulum ini bersifat terdiferensiasi, yaitu proses belajar yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan, minat, serta kebutuhan peserta didik, sekaligus mempertimbangkan karakteristik dan konteks lokal masing-masing satuan pendidikan (Munajim et al., 2020). Kurikulum Merdeka dikembangkan pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim sebagai respons terhadap tantangan globalisasi dan dampak pandemi COVID-19. Kurikulum ini menandai era baru pendidikan Indonesia yang berorientasi pada fleksibilitas dan kebebasan belajar.

Filosofi pendidikan yang melandasi Kurikulum Merdeka adalah humanisme dan esensialisme progresif yang terinspirasi oleh gagasan Ki Hadjar Dewantara, yakni bahwa pendidikan harus menuntun kodrat anak agar berkembang sesuai potensinya (Maulidiah et al., 2025). Gambar berikut menampilkan cuplikan dokumen keputusan menteri tersebut sebagai dasar hukum implementasi kurikulum di satuan pendidikan:



Gambar 6. Keputusan Mendikbudristek Nomor 262/M/2022 (Sumber : Mendikbudristek)

Tujuannya bukan sekadar memberi pilihan kurikulum, melainkan melakukan transformasi mendasar. Pada tahap awal, sekolah diberi opsi tetap menerapkan K 13. Kurikulum Darurat, atau beralih ke Kurikulum Merdeka. Namun, arah jangka panjang pemerintah adalah menjadikan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional utama yang menggantikan K-13 (Aditomo, 2022). Kurikulum Merdeka membawa sejumlah perubahan besar dibanding kurikulum sebelumnya, baik dari sisi struktur, pendekatan, maupun penilaian. Sistem penerapannya dirancang agar lebih adaptif, kontekstual, dan berfokus pada esensi pembelajaran (Kepmendikbudristekdikti, 2022).

PENUTUP

Perjalanan perkembangan kurikulum pendidikan nasional Indonesia dari era Orde Baru hingga Reformasi mencerminkan dinamika perubahan sosial, politik, dan budaya bangsa yang kompleks. Pada masa Orde Baru (1968–1998), kurikulum berfungsi sebagai instrumen politik dan ideologis yang dikendalikan secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Pendidikan difokuskan untuk mencetak warga negara yang taat, disiplin, dan loyal terhadap negara, dengan orientasi pada stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Kurikulum 1968 hingga 1994 dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, moral, dan nasionalisme, sementara pendekatan pembelajaran masih bersifat *teacher-centered* dan menekankan hafalan serta keseragaman. Kebijakan seperti penerapan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), sistem caturwulan, dan penataran P4 memperlihatkan kuatnya kontrol negara terhadap isi dan arah pendidikan.

Memasuki era Reformasi (2000–2022), paradigma pendidikan bergeser secara fundamental dari sistem yang sentralistik menuju desentralistik dan berbasis kompetensi. Kebijakan desentralisasi pendidikan. Pendidikan mulai berorientasi pada pembentukan kompetensi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik, bukan sekadar pada pencapaian akademik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evolusi kurikulum dari era Orde Baru hingga Reformasi bukan hanya sekadar perubahan administratif, tetapi juga representasi dari transformasi ideologis dan pedagogis bangsa Indonesia. Kurikulum kini tidak lagi dipandang sebagai alat politik, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menciptakan generasi yang berkarakter, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan global. Tantangan ke depan terletak pada kemampuan pemerintah, pendidik, dan masyarakat untuk mengimplementasikan kurikulum secara kontekstual, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Idi. (2013). *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktik*. Ar-ruzz Media.
- Aditomo, A. (2022). *Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Agustinova, D. E. (2018). Penerapan Kurikulum 2013 pada mata pelajaran sejarah pada Sekolah Menengah Atas. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 14(1).
- Alhamduddin. (2016). Sejarah Kurikulum di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum) (The History of Curriculum in Indonesia: An Analytical Study of Curriculum Development Policies). *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1, 43. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1014804&val=15400&title=Dinamika Perubahan Kurikulum Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 PAUD](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1014804&val=15400&title=Dinamika%20Perubahan%20Kurikulum%20Kebijakan%20Perubahan%20Kurikulum%202013%20PAUD)
- Ananda, A. P., & H. (2021). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*.
- Arifin, Z. (2011). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. PT Remaja Rosda Karya.
- Aslan. (2019). *Hidden Curriculum*. E-booksia Publisher CV Pena Indis.
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Ombak.
- Farah, D. I. (2019). Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8((1)), 43-64.
- Fitri Wahyuni. (2015). Kurikulum dari Masa Ke Masa. *Jurnal, Al-Adabiya*, Vol. 10(Vol. 10 No.2.).
- Indonesia, D. P. dan K. R. (1976). *Kurikulum Sekolah Dasar 1975: Garis-Garis Besar Program*

Pengajaran. 6.

- Kebudayaan, D. P. dan. (1985). *Kurikulum 1984 SMA GBPP Mata Pelajaran Biologi Kelas I Semester 1-2 Program Inti 1985.pdf*.
- Kepmendikbudristekdikti. (2022). Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022. *Menpendikbudristek*, 1–112. https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20220711_121315_Fix_Salinan_JDIH_Kepmen_Perubahan_56_Pemulihan_Pembelajaran.pdf
- Kristiawan, M. (2017). Transformasi kurikulum di Indonesia dalam perspektif desentralisasi pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 6(2), 112–124.
- Maulidiah, K., Aghnia Husnul Amali Iqdh, M.Ridho Alamsyah, Rosida Rakhmawati Muhammad, & Bambang Sri Anggoro. (2025). Analisis Transformasi Pendidikan pada Kurikulum Merdeka: Implementasi dan Peran Fasilitas Pembelajaran. *Didactical Mathematics*, 7(1), 73–83. <https://doi.org/10.31949/dm.v7i1.12529>
- Mulyasa, E. (2013). *Kurikulum 2013: Panduan implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Munajim, A., Barnawi, B., & Fikriyah, F. (2020). Pengembangan Kurikulum Pembelajaran di Masa Darurat. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, 4(2), 285. <https://doi.org/10.20961/jdc.v4i2.45288>
- Nugroho, T., & Narawaty, D. (2022). Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat(2020-2021), Dan Kurikulum Prototipe Atau Kurikulum Merdeka (2022) Mata Pelajaran Bahasa Inggris: Suatu Kajian Bandingan. *Sinistra: Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Seni, dan Sastra*, 1(1), 373–382. <https://proceeding.unindra.ac.id/index.php/sinistra/article/view/6099>
- Rahmadanty, Zamjani, I., Solihin, L., Nuraini, F., Rachmat, S. N. A. H., K., B. G., Rakhmah, D. N., Pratama, J. P. J. A., Wicaksono, E., Samosir, I., & Pradhia. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka dan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta Didik. *Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*, 1–68. <https://koran-jakarta.com/literasi-dan-numerasi-peserta-didik-masih-rendah?page=all>
- Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2008). *Salinan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor Xxvii/Mprs/1966 Tahun 1966 Tentang Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan*. 1969(1), 1–24.
- Saffina, A. D., Muzaki, F. F., & Simatupang, M. Z. (2020). Perubahan Kurikulum di Awal Era Reformasi (2004-2006) dan Dampaknya terhadap Pendidikan Nasional. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 2(1), 52–62.
- Soedijarto. (2008). *Landasan dan arah pendidikan nasional kita*. Kompas.
- Suhartono, W. P. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Graha Ilmu.
- Sumargono. (2021). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Lakeisha.
- Tilaar, H. (1955). *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945 - 1995*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Grasindo.
- Wardiman, D. (1996). *Lima Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Depdikbud.
- Wina Sanjaya. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Prenadamedia Group.
- Wirianto, D. (2014). Perspektif Historis Transformasi Kurikulum di Indonesia. *Islamic Studies Journal*, 2, 140–147. Dicky Wirianto Perspektif Historis Transformasi Kurikulum di Indonesia.pdf